

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN KAMPUNG KB DI
DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN
KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



HAMRIZAL
NPM 157310519

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK

Hamrizal

Kampung KB merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, daerah aliran sungai, dan wilayah nelayan diseluruh tanah air. Membuat kebijakan publik mengenai Kampung KB merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam pengupayaan menyelesaikan permasalahan pada pembinaan Kampung KB. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap Kampung KB untuk mendorong berbagai kegiatan Kampung KB. Akan tetapi, Pembinaan tersebut belum dilakukan secara maksimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam Peran Camat dalam pembinaan tersebut. Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum berjalan secara efektif. Faktor penghambat Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun adalah belum adanya anggaran dana, kurangnya program pembinaan Kampung KB dan kurangnya koordinasi antar Camat dengan pengelola Kampung KB dan antar dinas BKKBN Kabupaten Karimun.

Kata Kunci : Peran, Pembinaan, Kampung KB

THE ROLE OF CAMAT IN THE DEVELOPMENT OF KB CAMPAIGN IN PENARAH VILLAGE, DISTRICTS BELAT, KARIMUN DISTRICT

ABSTRACT

Hamrizal

KB Village is a program that was developed as an effort to improve the quality of life of families and communities, especially those in rural areas, poor, densely populated, disadvantaged, remote, watershed areas, and fishing areas throughout the country. Making public policy on KB Village is one of the first steps the government has made in trying to solve the problems in developing KB Village. Therefore, it is necessary to provide guidance to the KB Village to encourage various KB Village activities. However, coaching has not been done optimally. The purpose of this study was to determine the Role of the Camat in the Development of the KB Village in Penarah Village, Belat District, Karimun Regency and to find out the inhibiting factors in the Camat's Role in the fostering. The type of research that the author uses in this study uses a qualitative method. The results showed that the Role of the Camat in the Development of the KB Village in Penarah Village, Belat District, Karimun Regency had not been running effectively. The inhibiting factors of the Camat's Role in the Development of KB Villages in Penarah Village, Belat Subdistrict, Karimun Regency are the lack of funding budgets, the lack of a KB Family Development program and the lack of coordination between the Camat with the KB Village management and between the BKKBN Karimun Regency offices.

Keywords: Role, Development, KB Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik dipusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib dan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi membuka peluang untuk suatu daerah menjadi maju dan berkembang dengan manfaat sumber-sumber yang ada di daerahnya, yang hal ini tidak dapat terwujud ketika sistem sentralisasi masih ditetapkan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A Dan Kelurahan pada Pasal 3 Ayat 2 uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan membina pemerintahan desa / kelurahan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan;
- e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- f. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- g. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas - tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati tersebut maka, Camat memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung Keluarga Berencana (KB) termasuk dalam pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan program pembinaan Camat ke Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A Dan Kelurahan.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisiensi dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan

pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Tabel I.1 Jenis atau Kegiatan Pembinaan Camat Terhadap Desa

No	Bidang	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Ketentraman dan ketertiban	Program pembinaan dan fasilitasi daerah bawahan	Pelatihan Linmas Kecamatan Belat
			Pembinaan dan sosialisasi tugas pokok dan fungsi RT/RW/Dusun
		Program peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan	Bazar MTQ tingkat Kabupaten
			Peringatan hari besar keagamaan
2	Pemberdayaan masyarakat	Program perencanaan pembangunan daerah	Musrembang tingkat Kecamatan
		Program perencanaan dan pembangunan daerah	Sosialisasi dan pembinaan Tim UKS Desa, Sekolah sekecamatan belat
		Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Sosialisasi dan pembinaan Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI)

1	2	3	4
			Pembinaan Kampung KB Kecamatan Belat
			Keikutsertaan Kecamatan Belat dalam jambore kader PKK tingkat Kabupaten

			Karimun
			Keikutsertaan Kecamatan Belat dalam jamboree Kader posyandu tingkat Kabupaten Karimun
3	Kesejahteraan social	Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penyaluran beras sejahtera (RASTRA)
4	Lingkungan hidup	Program pengelolaan ruang keterbukaan hijau	Pengadaan tong sampah
			Pengelolaan lampu jalan, hias, dan taman
			Sosialisasi dan pembinaan pola sanitasi sehat
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan bahu jalan
			Peningkatan kebersihan jalan

(Sumber: Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016)

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Program Kampung Keluarga Berencana (KB) diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan meningkatkan keterpaduan lintas sektor dalam intervensi program pembangunan.

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan

pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2017).

Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai ikon program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar menyusun :

1. Suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019
2. Program tersebut dapat menjadi ikon Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.
3. Dalam hal ini kemudian disepakati agar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).
4. Adanya program Kampung Keluarga Berencana (KB) diharapkan terjalin keterampilan yang sinergis antara sektor pembangunan dalam penerapannya secara nyata dan berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat Indonesia.

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) tersebut terus dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penarah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Kepengurusan Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, tepatnya

pada tanggal 09 november 2017 telah terpilih salah satu RW yaitu RW 05 Kampung Seberas di Desa Penarah Kecamatan Belat sebagai Kampung KB pertama. Kampung KB di RW 05 tersebut, RW 05 ini terpilih menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB) karena terbilang kampung yang tertinggal dan tingkat kesejahteraan warganya yang masih rendah, serta terletak di daerah pesisir. Kampung Keluarga Berencana (KB) RW 05 ini yang diharapkan dapat menjadi kampung percontohan atau ikon bagi kampung yang lainnya.

Tabel 1.1 Kepengurusan Kampung KB Desa Penarah

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Aribowo Hadibroto, SSTP.M.MPd	Pembina	Camat Belat
2	Awaluddin	Penasehat	Kepala Desa
3	Suryana	Penanggung Jawab	PLKB Desa
4	Suprianto	Ketua	
5	Zaidah	Sekretaris	
6	Zulhijah	Bendahara	
7	Safri	Anggota	
8	Ngadiman	Anggota	

(Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Penarah Nomor 08 Tahun 2017)

Melalui program Keluarga Berencana (KB) ini pemerintah mengharapkan terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), yaitu keluarga dengan Dua anak sebagai tujuannya. Pemerintah terus memotivasi, menghimbau, dan menekankan kepada masyarakat agar memiliki keluarga kecil dengan slogan Keluarga Berencana (KB), “Dua Anak Cukup”. Keseriusan Pemerintah tersebut dalam menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), Pemerintah menyusunnya dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara utuh di lini lapangan. Kampung Keluarga Berencana (KB) melibatkan segala Bidang dilingkungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan bersinergi dengan Kementrian/Lembaga, mitra kerja, *Stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB) di seluruh Kabupaten dan Kota.

Tiga tahun berlalunya Program Kampung Keluarga Berencana di RW 05 Desa Penarah, partisipasi warga untuk menjadi peserta aktif KB masih rendah dibandingkan dengan RW lain yang tidak termasuk dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB), sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga proses administratif tidak efisien dan data base sulit diakses, masih terbatas dari segi sumber daya manusia, partisipasi masyarakatnya belum maksimal.

Kendala dalam mewujudkan program Kampung Keluarga Berencana (KB) tersebut bukan hanya dari partisipasi masyarakatnya, namun ternyata dari peran camat belum cukup berperan setelah tiga tahun lebih berdirinya Kampung Keluarga Berencana (KB) di RW 05 ini, pemerintah hanya memfasilitasi pada proses peresmian saja, pembinaan dan sosialisasi Program KB dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Karimun pun

hanya sebatas perwakilan dari Kampung Keluarga Berencana (KB) saja yang dipanggil menghadap ke pusat, sedangkan ekspektasi dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah ingin seluruh masyarakat mengikuti semua program KB yang tujuan utamanya adalah menekan jumlah penduduk, khususnya di wilayah yang menjadi kampung percontohan program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan di Indonesia pada umumnya.

Dalam sarana prasarana maupun proses administratifnya pun di Kampung Keluarga Berencana (KB) RW 05 ini masih menggunakan cara manual yaitu ditulis tangan untuk segala pembukuannya, dikarenakan pengurus tidak mendapatkan inventaris berupa peralatan dan perlengkapan yang berbasis teknologi untuk memudahkan dalam semua prosesnya, seperti komputer, laptop atau peralatan lain yang memadai. Oleh sebab itu, berbagai *database* terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana (KB) di RW 05 ini pun sulit untuk didapatkan dan dikhawatirkan hilang, sehingga akan menimbulkan kendala dalam proses evaluasi selanjutnya. Peneliti pun sedikit terkendala untuk merekap data-data di Kampung Keluarga Berencana (KB) RW 05 tersebut. Selain kendala tersebut berdirinya Kampung Keluarga Berencana disini disebabkan juga karena tingkat pendidikan yang minim dimasyarakat.

Tabel 1.I Data Peserta KB dan Bukan Peserta KB Desa Penarah

No	RT	Peserta KB	Bukan Peserta KB	Total
1	2	3	4	5
1	1	9	8	17
2	2	15	4	19
3	3	15	3	18
4	4	15	6	21
5	5	15	4	19
6	6	13	4	17
7	7	8	2	10

8	8	9	1	10
9	9	8	3	11
10	10	8	3	11
11	11	13	3	16
12	12	14	7	21
13	13	16	1	17
Jumlah		158	49	207

(Sumber Data Olahan 2019)

Dengan letak yang strategis memiliki pulau yang berpotensi besar untuk dikembangkan, dan ditunjang dengan berbagai sumber daya alam yang dapat diolah dan dikembangkan oleh dunia usaha baik bidang industry, perdagangan, wisata mangrup, maupun bidang pertanian dan perkebunan oleh karena itu sangat diperlukan peran camat dalam membina Kampung Keluarga Berencana (KB) agar desa-desa menjadi lebih maju dan berubah kearah yang lebih baik. Penulis memfokuskan penelitian ini pada pembinaan Camat terhadap Kampung Keluarga Berencana (KB) . Disini menemukan beberapa fenomena yang terjadi yaitu:

1. Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB) belum menjalankan 8 (Delapan) fungsi keluarga secara utuh, yaitu fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya maupun pembinaan lingkungan.
2. Belum ada dilakukan peran Camat dalam pengarahan terhadap buku pedoman pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) dan pelatihan terhadap Kampung Keluarga Berencana (KB)..

Berdasarkan fenomena diatas dan kondisi pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) peneliti mengidentifikasi masih belum optimalnya pembinaan

yang dilakukan Camat menyebabkan tidak efektifnya kinerja program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dengan sektor pembangunan. Sehingga peneliti tertarik untuk berjudul **“Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : **”Bagaimana Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat ?”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil peranan Camat dalam membina Kampung KB desa di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun..
- b. Untuk mengetahui hambatan Camat dalam membina Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan khusus ilmu pemerintahan dalam memenuhi konsep peran dan pembinaan.

- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Guna Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk Camat dalam melaksanakan pembinaan terhadap kampung KB.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan lembaga, pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata “perintah” yang ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat- syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005:11).

Budiarjo (2008:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses perbuahan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama pemerintahan ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktifitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Struktur fungsional meyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa tokoh yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pemerintah merupakan suatu organisasi, dimana didalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan tugas ataupun menjalankan kebijakan- kebijakan untuk kepentingan masyarakat ataupun negara. Untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam menjalankan kebijakan- kebijakan

pemerintah harus mampu mengayomi masyarakat serta bersifat adil dan bijaksana, sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai pemerintah.

b. Fungsi Pemerintahan

Rasyid (2000:13), menyatakan bahwa tugas- tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*) dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2011:85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggaraan pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berarti itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh

pemrintah, mengingat dimasas mendatang perubahan- perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

2. Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat sera dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat- syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik. Jadi, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005:20).

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislasi, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.

Ndraha (2003) juga menyebutkan bahwa epistemologi ilmu pemerintahan itu mengembangkan konsep hubungan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multi disiplin (memandang suatu konsep masalah dari berbagai aspek).

3. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis. Melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan ditentukan terlebih dahulu.

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan- keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.
- b. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan- kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.

- d. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidak tatakelola pemerintahan.

Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

4. Pemerintah Daerah

Sebelum memasuki pembahasan tentang pemerintahan daerah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pemerintahan itu sendiri. Syaukani (2002:33) mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik didalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dengan pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian juga donor mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arti luas meliputi badan- badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan dipusat, kemudian terdapat juga instansi- instansi yang melaksanakan keputusan dari badan- badan tersebut. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang

berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuan agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. (Mustamin 2004:24-26)

Adaya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi tidak berarti putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karenanya tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi atau hanya pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban berat dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi kepada organisasi yang lebih rendah inilah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak

hirarko organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi dibawahnya (pemerintah daerah). Karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut disertai wewenang penuh, baik politik maupun organisasi maka pada jenjang organisasi yang disertai wewenang tersebut timbul otonomi.

Penyelenggaraan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejak terbitnya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengalami kondisi yang sangat dinamis. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam pembinaan Kampung KB terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, Keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.

5. Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu etnis pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintah di Indonesia, Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan jelas dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pengaturan mengenai Kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pada pasal 10 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

- a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai perangkat daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 226 ayat (1) bahwa: “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan Bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis Bupati/Walikota.

Menurut Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

1. Kecamatan dalam arti kantor camat;
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
3. Camat sebagai Bapak “Pengetua wilayahnya”

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif.

6. Kampung KB dan Kualitas Hidup Masyarakat

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2017).

Secara umum tujuan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung Keluarga Berencana (KB) ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung Keluarga Berencana (KB) selain keluarga. Penduduk Usia Subur (PUS), lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksanaannya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT,

PKB, Petugas lapangan sektor terkait, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Kader Institusi Masyarakat Perdesaan, dalam hal ini Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh agama, Tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

7. Peran

Peran menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soekanto (2002:243) Pengertian peranan adalah sebagai berikut: peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994:768) dalam buku “ensiklopedia manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu pranata;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan menurut Grass,dkk (1995: 100) yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan Bery mendefinisikan “Peranan sebagai perangkat harapan- harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

Peranan adalah perangkat harapan- harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam- macam peranan yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soekanto (2002: 243), pembahasab perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu- individu dalam masyarakat, penting bagi hal- hal sebagai berikut :

- a. Bahwa peranan- peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;

- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu- individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu- individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan- kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang- peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang- peluang tersebut.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut- atribut atau ciri- ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan didalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut- atribut lahiriah tersebut.

8. Pembinaan

Menurut Thoha (1989 : 7) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsure dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Thoha (1984, 1986, halaman 180) Pembinaan Organisasi merupakan suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi, dengan mempergunakan pengetahuan ilmu perilaku. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembinaan organisasi tidak hanya “sesuatu yang dikerjakan untuk pencapaian keadaan organisasi yang lebih baik”, melainkan merupakan suatu jenis proses perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan yang khusus dalam suatu organisasi.

Pembinaan Organisasi merupakan suatu preskripsi untuk suatu perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan yang berencana didalam suatu organisasi tertentu. Adapun unsur-unsur pokok dari preskripsi tersebut antara lain:

- A. Berencana dan berjangka panjang
- B. Organisasi secara keseluruhan
- C. Dikelola
- D. Efektivitas dan kesehatan organisasi

- E. Intervensi yang berencana
- F. Pengetahuan ilmu perilaku

Thoha (2005,45) menyatakan bahwa pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang memiliki sifat taat setia, patuh, bermentalbaik, berwibawa, dan berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi serta sadar akan tanggung jawab sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan juga aparatur Negara. Pembinaan tersebut terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Dari pengamatan tentang pengertian tersebut, ternyata pembinaan organisasi merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*). Strategi tersebut berlandaskan pada teori dan riset ilmu perilaku dan mempunyai sifat perskriptif yang substansial. Pembinaan organisasi merupakan suatu pernyataan yang normatife, yakni yang menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana dalam suatu organisasi harus didekati dan dilaksanakan, jika penyempurnaan merupakan keharusan bagi organisasi tersebut. Mengenai peningkatan kinerja melalui tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik,tidak terlepas dari berbagai faktor kompetensi pengelola atau pegawai tetapi juga faktor penunjang. Pentingnya faktor kepemimpinan karena peranannya, bukan hanya sebagai penentu arah, pengatur dan pengendali tetapi juga sebagai motivator maupun inovator. Adapun indikator dari pembinaan tersebut dimulai dari perencanaan, pemberian bimbingan, pengarahan, dan pendidikan atau pelatihan.

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa Pembinaan adalah proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan dan akhirnya mengembangkan, dnengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan menurut Winkel (2002:29) disebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktifitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani dan rohani.

Selain itu, menurut Efendi (2003:24) disebutkan bahwa Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mecapai titip maksimal.

Mangunhardjana (2004:17) mengatakan bahwa unsur-unsur dalam pembinaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pambinaan maupun berhubungan dengan pengalaman mereka.

2. Isi tidak selalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, dapat dipraktekkan dengan waktu yang tersedia

Penyalahgunaan bisa dihindari, jika para aparatur sebagai pelaksana dalam menjalankan proses pemerintahan secara konsisten menyadari tugasnya.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

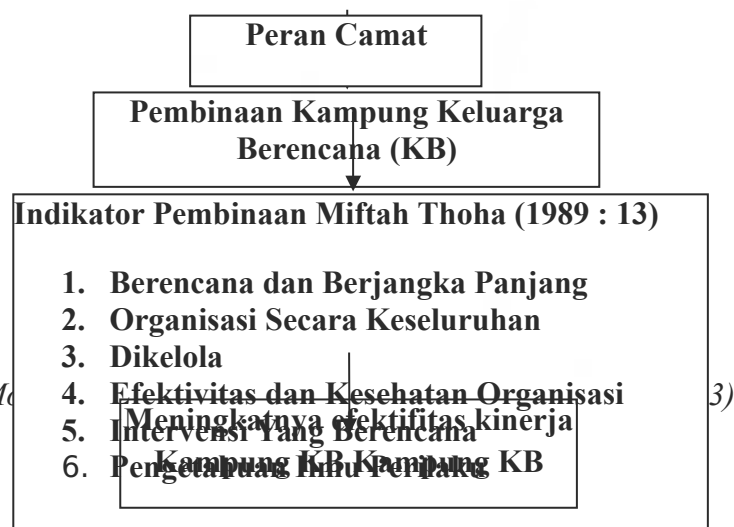
N o	Nama	Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Dedi Arianto	Peranan Camat Dalam Membina	2012	Sama-sama meneliti	Penelitian ini mengkaji tentang
2	Lathifatun Nafisah	Efektifitas Kampung KB Dalam	2018	Sama-sama meneliti	Penelitian ini meneliti tentang
3	Nurhafifah Zultha	Implementasi Program Kampung	2017	Sama-sama meneliti	Penelitian ini menggunakan
4	Linda Ratna Sari	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kampung KB di Kab.Jombang (Sumber Jurnal Pendidikan, Vol 2 Hal 2, 2018)	2018	Sama-sama meneliti tentang kampung KB	Penelitian ini meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kampung KB. Sedangkan penelitian saya meneliti tentang Peran Camat dalam pembinaan Kampung Keluarga Berencana (KB)
N o	1	2	3	4	5
5	Arizki Istiadi	Implementasi program kampung keluarga berencana (Sumber Jurnal Mahasiswa UNESA, Vol 1 No 1, 2012)	2012	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan kampung KB	penelitian ini mengkaji tentang Implementasi program kampung KB, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang peran camat dalam pembinaan
6	Mardiyono	Kampung KB sebagai upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga di Jawa Timur (Sumber Jurnal Cakrawala, Vol 11 No 2, 2017)	2018	Sama-sama meneliti tentang kampung KB	Pelaksanaan studi ini menggunakan metode evaluatif dengan rancangan deskriptif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif

(Sumber: Modifikasi Peneliti 2019)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas tentang peran pembinaan camat dan Kampung KB yang dijadikan rujukan dan referensi pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti laksanakan. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran camat dalam pembinaan Kampung KB di Desa Penarah kecamatan Belat kabupaten Karimun. Karena judul penelitian ini *relatife* masih baru bahwa pembinaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan efektifitas kinerja suatu program. Dalam penelitian ini untuk indikator pembinaan menggunakan teori Miftah Thoha (1989) dan menggunakan penelitian metode kualitatif.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.



(Sumber: Mo

3)

Berdasarkan kerangka piker diatas Camat sebagai pemimpin organisasi pemerintah kecamatan memegang tanggung jawab yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dalam hal ini Camat harus benar-benar dapat membina, peran Camat dalam pembinaan Kampung Keluarga Berencana (KB) terdapat dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 3. Untuk mengetahui peran Camat dalam pembinaan peneliti menggunakan teori indikator Miftah Thoha 1989, agar pembinaan dapat meningkatkan efektifitas kinerja dari Kampung Keluarga Berencana (KB).

D. Konsep Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Kecamatan Belat Kabupaten Karimun untuk mencapai keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.
2. Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota.
3. Peranan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
4. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, Dusun, atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB,2016).
5. Pembinaan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan agar Program Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera dengan Kegiatan Kampung KB dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

6. Berencana dan berjangka panjang adalah sifat dari usaha atau program pembinaan organisasi ini merupakan program yang berjangka panjang, berencana, dan menyangkut proses dari suatu system yang luas. Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menepatkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
7. Organisasi secara keseluruhan adalah pembaharuan, perubahan, dan penyempurnaan yang terjadi didalam organisasi tersebut, stuktur organisasi yang saling berhubungan dengan pola aktivitas, interaksi, norma organisasi, perasaan orang-orang, kepercayaan, sikap, nilai dan hasil kerja.
8. Dikelola dalam penelitian ini kegiatan untuk semangat melakukan perubahan dan pembinaan organisasi pengelolaan dimulai dari pucuk pimpinan dengan melibatkan bawahan, usaha perubahan dan pembinaan membutuhkan kebijaksanaan, sikap-sikap yang baru (innovative), biaya, dan komitmen dengan waktu dan tenaga.
9. Efektivitas dan kesehatan organisasi adalah usaha untuk mencapai efektivitas dan kesehatan organisasi ditujukan untuk memajukan harkat kemampuan dan proses sosial dalam organisasi.
10. Intervensi yang berencana adalah usaha untuk melakukan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan dalam organisasi.
11. Pengetahuan ilmu perilaku merupakan usaha-usaha menambah pemahaman pada individu dan kelompok.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian
Pembinaan organisasi merupakan suatu preskripsi untuk perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan yang berencana didalam organisasi tertentu. Thoha (1989 : 13)	Pembinaan	1. Berencana dan Berjangka Panjang 2. Organisasi Secara Keseluruhan 3. Dikelola 4. Efektivitas dan Kesehatan Organisasi 5. Intervensi yang Berencana	a. Proses Perencanaan b. Perencanaan Berjangka Panjang a. Perubahan, Pembaharuan, dan Penyempurnaan keseluruhan b. Struktur Organisasi c. Norma Organisasi d. Kepercayaan e. Sikap a. Kepemimpinan b. Kebijaksanaan c. Sikap-sikap inovative d. Biaya e. Komitmen dengan waktu dan tenaga a. Menyesuaikan potensi b. Menyesuaikan kemampuan a. Pelatihan b. Pendidikan c. Metode reflektif d. Pengamatan sendiri e. Belajar mengerjakan sendiri
1	2	3	

			4
		6. Pengetahuan Ilmu Perilaku	a. Perasaan b. Sikap c. Motivasi

(Sumber Data Olahan 2019)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan pemecahan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini untuk menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti memahami lebih dalam Penelitian Kualitatif biasanya mengutamakan pendapat responden.

Menurut Moleong (2004:06) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2007; 15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Saryono (2010: 1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukandi Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa peran camat dalam membina Kampung Keluarga Berencana (KB) sejauh ini masih belum maksimal, hal ini terlihat dari fenomena yang memang mendukung hal

tersebut seperti masih belum efektifnya kinerja dari program kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Belat.

Kecamatan Belat memiliki 6 Desa dan penelitian difokuskan untuk 1 Desa yang menjadi lokasi penelitian yakni : Desa Penarah. Karena di Desa ini kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB) telah berjalan dan memiliki beberapa kendala yang menghambat efektivitas kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) ini mungkin terjadi karena kurangnya pembinaan Camat terhadap Kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB) tersebut.

C. *Key Informan Dan Informan*

Key informan adalah orang yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Informan* adalah orang yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan formal maupun *informan* dengan *key informan*. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para *informan* yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Tabel III.1 *Key Informan dan Informan Penelitian*

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ariwibowo Hadibroto S.STP. M.MP	Camat Kecamatan Belat	<i>Key Informan</i>
2	Iskandar	PLKB Kecamatan Belat	<i>Informan</i>
3	Suryani	Kasi Kesejahteraan Desa Penarah	<i>Informan</i>
4	Suprianto	Ketua Kampung KB	<i>Informan</i>
5	Zaidah	Peserta Kampung KB	<i>Informan</i>

Berdasarkan tabel diatas *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Belat. *Informan* dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, dan informasi. Adapun yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah Pelaksana Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah/ PLKB Desa, dan Ketua Kampung KB Desa Penarah atau Peserta Kampung Keluarga Berencana (KB).

D. Teknik Penentuan Key Informan dan Informan

Pemilihan *informan* sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan memberikan informasi dengan lengkap dan akurat. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah *informan* tetapi bisa tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan *key informan*, dan kompleksitas dari keragaman fenomena yang diteliti. Adapun teknik penunjukan *informan* dan *key informan* adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa *informan* yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan topik penelitian yang diperlukan.

Adapun yang menjadi *Key Informan* adalah Camat Belat Karena orang yang berkompeten pada bidangnya sebagai Pembina dalam Kampung KB di Desa Penarah. *Informan* dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel 4 (empat) *Informan* dimana *Informan* pertama adalah Pelaksana Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Belat, yang memiliki fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan, dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya tingkat Desa/Kelurahan. Kedua, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah yang merupakan penanggung jawab dalam Kampung KB Desa Penarah. *Informan* ketiga adalah Ketua Kampung KB

sebagai pengurus Pokja Kampung KB. Sementara *Informan* keempat yaitu seorang peserta Kampung KB yang juga termasuk dalam susunan kepengurusan Kampung KB tingkat Desa Penarah.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari para responden melalui penelitian lapangan tentang pembinaan tugas Kampung Keluarga Berencana (KB). Data yang diperoleh melalui wawancara, antara lain observasi dan wawancara dengan obyek langsung atau orang-orang dekat yang mengetahui tentang kampung Keluarga Berencana (KB).

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa keterangan-keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini berupa:

- a. Keadaan Geografis
- b. Keadaan Penduduk
- c. Data Program Kegiatan Kampung KB
- d. Data Pembinaan Camat
- e. Dan lain-lain

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian dengan metode kualitatif peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yaitu,

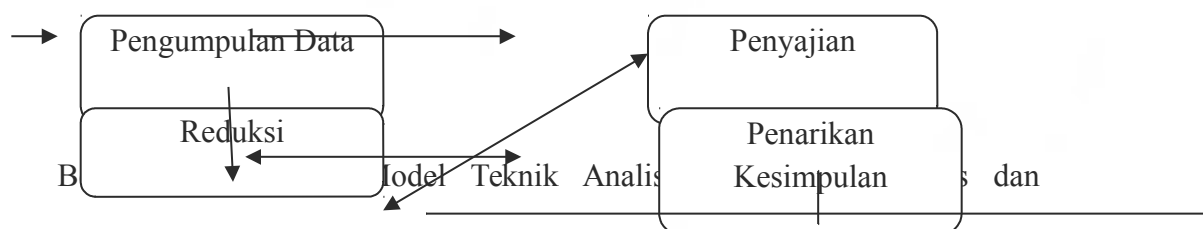
data berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk pengumpulan data kualitatif tersebut yaitu, wawancara mendalam, observasi terlibat, pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014: 133).

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel. Peneliti melakukan wawancara secara informal di Kantor Camat Belat dan Kantor Desa Penarah serta di rumah seorang Ketua Kampung KB.
2. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap penelitian untuk melihat kenyataan.
3. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Mengikuti konsep dari Miles and Huberman (1992: 16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

Gambar 1. Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1992: 16)



Huberman (1992: 16) menjelaskan ada tiga macam kegiatan dalam Analisis Data

Kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.
2. Penyajian Data atau analisis data setelah pengumpulan data, pada tahap ini dalam kegiatan penyajian atau penampilan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis. Penyajian data yang dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dari reduksi data dan penyajian data kemudian dirumuskan kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Peran Camat Dalam Pembinaan KB Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...																			
		Juli				Agustus				Desember				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissioner																				
5	Rekomendasi Survaiky																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisi Data																				
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Komferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Belat memiliki letak yang strategis yaitu merupakan salah satu kecamatan dari hasil pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara. Kecamatan Belat memiliki beberapa daerah pulau yang berpotensi besar untuk dikembangkan, dan ditunjang dengan berbagai sumber daya alam yang dapat diolah dan dikembangkan oleh dunia usaha baik dibidang industry, perdagangan, wisata mangrup maupun bidang pertanian dan perkebunan. Dalam arti luas kesemuanya berpotensi menjadikan daerah ini sebagai daerah Metropolitan baru yang akan hadir diwilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi Kecamatan Belat secara geografis berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Buru
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kundur Utara
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kundur
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Moro

Dengan Batas Wilayah tersebut Kecamatan Belat mempunyai Luas Wilayah keseluruhan 225 KM. Dengan Luas Daratan 129 KM dan Luas Lautan 96 KM, memiliki jumlah pulau 22 buah pulau. Pulau berpenghuni 9 buah pulau dan pulau yang tidak berpenghuni 13 buah pulau.

B. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kecamatan Belat berdasarkan Sumber Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Desember 2017 sebagai berikut :

Jumlah Penduduk	: 6.573 jiwa
Laki-laki	: 3.450 jiwa
Perempuan	: 3.123 jiwa
Jumlah Kartu Keluarga	: 2.002 Kartu Keluarga

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Belat

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
		RT	RW			LK	PR	Jumlah
1	Sebele	10	4	2	409	613	618	1.231
2	Lebuh	12	6	3	371	677	529	1.269
3	Penarah	13	5	3	414	710	620	1.330
4	Sungai Asam	12	5	3	364	653	611	1.264
5	Tebias	9	4	2	242	473	384	857
6	Degong	9	4	2	202	324	298	622
Jumlah		65	29	15	2.002	3.450	3123	6.573

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2017)

Berdasarkan data di atas dilihat bahwa jumlah kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Desa Penarah dengan Jumlah 1330 jiwa, Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah adalah Desa Degong dari seluruh Desa di Kecamatan Belat.

Komposisi penduduk Kecamatan Belat Menurut tingkat pendidikan sebagaimana pada table di bawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/ Belum Sekolah	2.522
2	Belum Tamat SD	654
3	Tamat SD	2.199
4	SLTP/ Sederajat	604
5	SLTA/ Sederajat	493
6	D-I/II	26
7	Akademi/ D-II/ Sarjana Muda	17
8	Strata I	57
9	Strata II	1
10	Strata III	-

Jumlah	6.573
--------	-------

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2017)

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa tingkat Pendidikan pada Kecamatan Belat masih rendah, dengan tingkat Pendidikan Strata II 1 orang, Strata I 57 orang Akademi/DII/Sarjana Muda 17 orang, SLTA 493 orang, SLTP 604 orang, Tamat SD 2.199 orang, Belum Tamat SD 654 orang, dan Tidak/Belum Sekolah 2.522 orang. Dengan adanya program Kampung KB yang memiliki tujuan sebagai peningkatan ketahanan dan kualitas hidup keluarga dalam masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan tingkat Pendidikan di Kecamatan Belat.

Komposisi penduduk Kecamatan Belat berdasarkan Mata Pencapaian sebagai berikut :

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Jiwa)
1	2	3
1	Belum Bekerja	1.327
2	Mengurus Rumah Tangga	1.752
3	Pelajar/ Mahasiswa	1.098
4	Pensiunan	2
5	Pegawai Negeri Sipil	47
6	Perdagangan	6
7	Petani/ Perkebunan	766
8	Konstruksi	590
9	Karyawan Honorer	19
10	Buruh Harian Lepas	1
11	Buruh Tani/ Perkebunan	1
12	Buruh Nelayan/ Perikanan	55
13	Buruh Perternakan	449
14	Pembantu Rumah Tangga	28
15	Tukang Cukur	29

16	Tukang Listrik	1
17	Tukang Jahit	4
18	Penata Rias	1
19	Pendeta	1
Jumlah		3.450

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2017)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Belat sebagian besar sebagai petani/ perkebunan 766 orang, konstruksi 590 orang, dan buruh peternakan 449 orang. Ini disebabkan karena tingkat Pendidikan yang rendah, potensi di wilayah Kecamatan Belat yang belum di optimalkan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

1. Camat

1. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut pada ayat (1) pasal ini, camat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan membina Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan;

- e. Menyusun rencana kerja pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

1. Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Masing-masing Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan perlengkapan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan.

2. Uraian tugas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi Kepegawaian Kecamatan;

- b. Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
 - c. Menyiapkan bahan, rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji secara berkala;
 - d. Menyiapkan bahan, rencana mengusulkan penilaian prestasi kerja kepegawaian Kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan;
 - f. Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan pencatatan prestasi penyelenggaraan kedisiplinan dan kasus kepegawaian Kecamatan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
 2. Uraian tugas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan;
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Kecamatan;
 - d. Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan;
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan ;
 - f. Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran;
 - g. Mengelola anggaran Kecamatan;
 - h. Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

3. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil;
- b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan;
- c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas penanggulangan masalah sosial;
- b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

6. Seksi Lingkungan Hidup

1. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Lingkungan Hidup.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Melakukan pengawasan kebersihan di lingkungan wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan koordinasi dan membina kesatuan pelindung masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan;

D. Visi Misi Kecamatan Belat

Visi Kecamatan Belat yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Berbasis Kerakyatan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Kabupaten Karimun”. Misi Kecamatan Belat sebagai berikut :

1. Menetapkan Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintah, Kegiatan Pembinaan, Ideologi Negara, dan Kesatuan Bangsa.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Keagrariaan dan Kependudukan.
3. Memantapkan Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Pemerintah Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Memantapkan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pemerintah Kecamatan.
5. Memantapkan Pelaksanaan Koordinasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
6. Mempermudah Alur Pelayanan Birokrasi Serta Memperpendek rentang Kendali Kepengurusan.
7. Memantapkan Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintah, Kegiatan Pembinaan, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
8. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Keagrariaan dan Kependidikan.

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Belat ini diupayakan dapat menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis di Kecamatan Belat, seperti terbatasnya infrastruktur antara lain jalan penghubung antar Desa, Pelabuhan, sarana kesehatan yang merupakan sarana penting untuk sebuah kecamatan. Selain itu

tidak berfungsinya pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempersulit pemasaran produksi pertanian, perikanan dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya juga merupakan sasaran dari visi dan misi Kecamatan Belat. Masih tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Belat (+- 1000 KK) dengan latar belakang pekerjaan sebagai petani +- 80%, Nelayan 15% dan lain-lain 5% merupakan tujuan dari Visi dan Misi Kecamatan Belat terhadap permasalahan strategis tersebut.

E. Kampung KB

Kampung KB dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, daerah aliran sungai, dan wilayah nelayan diseluruh tanah air. Selain itu, Kampung KB dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung Nawa Cita yang merupakan prioritas pembangunan nasional, khususnya cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

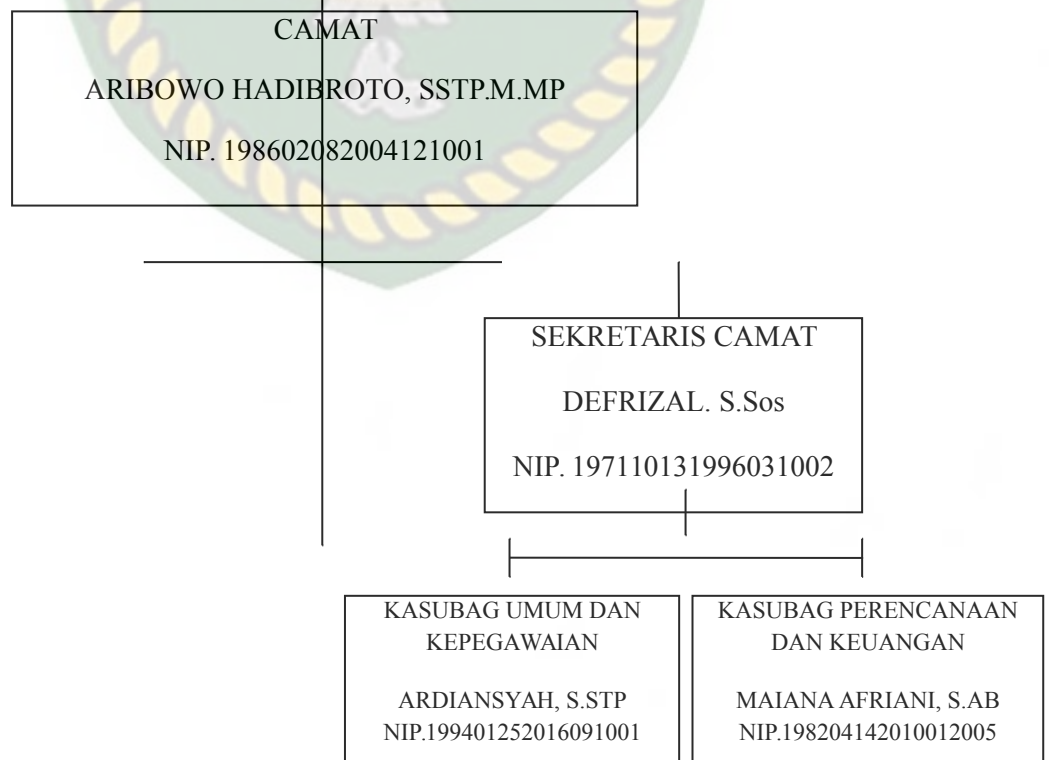
Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung Keluarga Berencana (KB) selain keluarga. Penduduk Usia Subur (PUS), lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksanaannya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Kader Institusi Masyarakat Perdesaan, dalam hal ini Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh agama, Tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

F. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi

Gambar IV.1 Bagan Struktur Kecamatan Belat Tahun 2020



(Sumber:Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2019)

Bagan struktur Kampung KB Desa Penarah Kecamatan Belat

Gambar IV.2 Bagan Struktur Kampung KB



ANGGOTA

(Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Penarah Nomor: 08 Tahun 2017)



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat dalam penelitian ini menurut data yang didapat dari wawancara. Pemilihan Informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Untuk mengetahui bagaimana Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, maka dijelaskan berdasarkan uraian berikut :

a. Jenis Kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bahan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat dari tabel ini :

Tabel V.1 Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	2
Jumlah		5

(Sumber modifikasi penulis , 2020).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2

orang. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa terbanyak informan dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang dan yang berjenis kelamin perempuan hanya 2 orang.

b. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	3
5	D-1 – D-3	-
6	S-1	2
7	S-2	-
8	S-3	-
Jumlah		5

(Sumber : Modifikasi Penulis, 2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak 2 orang. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 3 orang.

3. Tingkat Umur Informan

Dalam menentukan Informan juga dilihat dari faktor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang dan juga mempengaruhi pola fikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia Informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30	1
2	31-40	3
3	41-50	1
Jumlah		5

(Sumber:Modifikasi Penulis 2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang, dan yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang. Jadi berdasarkan gambaran diatas dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah cukup dewasa yaitu 21-30 tahun yang dijadikan informan sebanyak 1 orang dan yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang.

B. Hasil Penelitian Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembinaan organisasi menurut Thoha (1989:13) dimana indikator-indikator tersebut adalah

1. Berencana dan berjangka panjang
2. Organisasi secara keseluruhan
3. Dikelola
4. Efektivitas dan kesehatan organisasi
5. Intervensi yang berencana
6. Pengetahuan ilmu perilaku

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan indikator peneliti.

a. Berencana dan Berjangka Panjang

Berencana dan berjangka panjang adalah sifat dari usaha atau program pembinaan organisasi ini merupakan program yang berjangka panjang, berencana, dan menyangkut proses dari suatu sistem yang luas. Suatu proses

menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menepatkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Oleh karena itu, supaya perubahan tersebut bisa berhasil hendaknya direncanakan dan berjangka panjang.

Bedasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Ariwibowo Hadibroto, S.STP. M.MP selaku Camat Kecamatan Belat mengatakan bahwa :

Peran yang dilakukan Camat selaku Pembina Kampung KB memang belum menyeluruh direncanakan secara tertata, dikarenakan Anggaran untuk perencanaan pembinaan kepada setiap Kampung KB belum di anggarkan, dan selama ini hanya dilakukan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Karimun untuk perencanaan setiap kegiatan Kampung KB. Perencanaan pembinaan itu sendiri sudah tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 Dan peran Camat selaku pembina disini hanya bisa memfasilitasi dalam peresmian dan mengikuti setiap kegiatan Kampung KB bersama PLKB Kecamatan Belat (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Belat Rabu 18 Desember 2019_10 : 45 WIB).

Camat Kecamatan Belat mengungkapkan bahwasanya belum adanya anggaran merupakan salah satu penghambat dalam pembinaan Kampung Keluarga Berencana (KB), Selanjutnya hasil wawancara dengan Iskandar beliau mengungkapkan :

Pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan masih hanya dalam Program Kegiatan rutin Kampung KB dan selaku PLKB Kecamatan memantau jalannya kegiatan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan. Kampung KB Desa Penarah ini masih melakukan sedikit kegiatan Kampung KB dan belum keseluruhan, seperti Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga , Bina Keluarga Lansia, Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II. Sehingga kami dari pihak PLKB Kecamatan belum bisa melakukan perencanaan pembinaan secara berjangka panjang kerena ruang lingkup kegiatan yang masih terfokus pada

pembinaan BKKBN sendiri (Iskandar, Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga berencana Rabu 18 Desember 2019_11:30 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa belum bisa melakukan perencanaan secara berjangka panjang karena segala kegiatan Kampung KB masih terfokus pada pembinaan BKKBN sendiri, sehingga Camat hanya mengikuti setiap kegiatan yang lakukan dilaksanakan oleh BKKBN untuk Kampung KB. Beda halnya dengan pernyataan dari Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah yang menyatakan belum adanya perencanaan terhadap Kampung KB dari Kecamatan untuk saat ini. Suryani beliau menyatakan bahwa :

Perencanaan pembinaan terhadap Kampung KB dari Kecamatan untuk saat ini masih belum ada secara tertulis. Selama ini peran camat dalam Kampung KB hanya mengikuti setiap kegiatan yang diadakan dari BKKBN Kabupaten Karimun, Camat hanya melakukan perencanaan penentuan lokasi Kampung KB sesuai data PLKB Desa dan menetapkan serta meresmikan Kampung KB. Untuk perencanaan pembinaan terhadap Kampung KB saat ini masih belum adanya koordinasi dari kecamatan ke Desa (Suryani,Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah, Kamis 19 Desember 2019_10:00 WIB).

Dari ungkapan diatas bahwa Camat belum ada melakukan sebuah perencanaan terhadap Kampung KB, Camat hanya melakukan perencanaan pencanangan Kampung KB baru-baru ini dan menetap kan serta meresmikan Kampung KB saja. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kampung KB Desa Penarah beliau mengatakan :

Pembinaan terhadap Kampung KB masih belum dirasakan oleh setiap pengurus Kampung KB, bahkan untuk perencanaan pun masih belum di agendakan. Selaku ketua Kampung KB hanya diberi arahan dari Camat untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak BKKBN Kabupaten Karimun. Peran Camat terhadap Kampung KB mungkin hanya pada saat peresmian Kampung KB dan saat dilakukan

Kegiatan Kampung KB oleh BKKBN Kabupaten, sehingga pembinaan masih belum di dapatkan secara teragenda (Suprianto, Ketua Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:00 WIB).

Ungkapan diatas mengatakan bahwa selaku Ketua Kampung KB Pembinaan masih belum dirasakan dan perencanaan pun belum terdengar ada, sehingga tidak mengetahui perencanaan apasaja yang dilakukan oleh Kecamatan. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan peserta Kampung KB Desa Penarah beliau mengungkapkan :

Selaku peserta Kampung KB kami hanya melaksanakan kegiatan seperti biasa terhadap program KB belum mendapatkan suatu kegiatan yang berbeda. Untuk pembinaan banyak dilakukan dari pihak BKKBN Kabupaten Karimun seperti bimbingan dan pengarahan". Peran dari Camat untuk perencanaan terhadap pembinaan Kampung KB masih belum ada (Zaidah, Peserta Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:35 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa peserta Kampung KB tidak mengetahui secara pasti perencanaan apa yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap Kampung KB Desa Penarah untuk saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa peran Camat dalam pembinaan Kampung KB terkait dengan berencana dan berjangka panjang yang telah disampaikan oleh *Key Informan* dan *Informan* perencanaan dalam pembinaan Kampung KB sudah dilaksanakan, namun belum adanya anggaran merupakan salah satu penghambat dalam pembinaan Kampung KB. Dengan demikian pembinaan Kampung KB masih terfokuskan pada pembinaan dari BKKBN Kabupaten Karimun, sehingga Camat hanya mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN untuk Kampung KB seperti Bina Keluarga Berencana (BKB),

Bina Keluarga (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R/M), Tahapan keluarga sejahtera yaitu Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa Camat sudah melakukan perencanaan terkait pembinaan Kampung KB di Desa Penarah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan, namun kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan Desa Penarah dan Kampung KB sehingga dari Kepala Seksi Kesejahteraan dan PLKB Desa Penarah, Ketua Kampung KB dan Peserta Kampung KB mengungkapkan tidak adanya perencanaan terkait pembinaan terhadap Kampung KB yang dilakukan oleh Camat. Ini membuktikan bahwa peran Camat masih dianggap belum optimal dan menyeluruh, dikarenakan belum memberikan pembinaan dalam bentuk perencanaan belum meningkatkan kinerja dari Kampung KB dan segala kegiatan hanya diarahkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Camat untuk saat ini hanya mengiuti setiap program Kampung KB sesuai agenda dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun.

Tabel V.1 Program Pembinaan Camat ke Desa berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016

No	Bidang	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Ketentraman dan ketertiban	Program pembinaan dan fasilitasi daerah bawahan	Pelatihan Linmas Kecamatan Belat
			Pembinaan dan sosialisasi tugas pokok dan fungsi RT/RW/Dusun
		Program peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan	Bazar MTQ tingkat Kabupaten
			Peringatan hari besar keagamaan
2	Pemberdayaan masyarakat	Program perencanaan pembangunan daerah	Musrembang tingkat Kecamatan
		Program perencanaan dan pembangunan daerah	Sosialisasi dan pembinaan Tim UKS Desa, Sekolah sekecamatan belat
		Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Sosialisasi dan pembinaan Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI)
			Pembinaan Kampung KB Kecamatan Belat
			Keikutsertaan Kecamatan Belat dalam Jambore Kader PKK tingkat Kaabupaten Karimun
			Keikutsertaan Kecamatan Belat dalam Jambore Kader Posyandu tingkat Kabupaten Karimun
3	Kesejahteraan Sosial	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penyaluran Beras Rastra
4	Lingkungan Hidup	Program pengelolaan ruang keterbukaan hijau	Pengadaan tong sampah

			Pengelolaan lampu jalan, hias dan taman
			Sosialisasi dan pembinaan pola sanitasi sehat
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan bahu jalan
			Peningkatan kebersihan jalan

(Sumber : Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas bahwa sudah adanya perencanaan untuk pembinaan Kampung KB didalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan Pembinaan Kampung KB Kecamatan Belat sesuai dengan pernyataan dari wawancara dengan peneliti. Perencanaan pembinaan Kampung KB terdapat dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan uraian tugas Kecamatan tipe-A dan Kelurahan.

b. Organisasi Secara Keseluruhan

Organisasi secara keseluruhan adalah pembaharuan, perubahan, dan penyempurnaan yang terjadi didalam organisasi tersebut, stuktur organisasi yang saling berhubungan dengan pola aktivitas, interaksi, norma organisasi, perasaan orang-orang, kepercayaan, sikap, nilai dan hasil kerja. Pembaharuan, perubahan dan penyempurnaan yang terjadi dalam organisasi, hendaknya berlaku secara keseluruhan, bukan secara parsial sepotong demi sepotong. Dengan demikian jika hendak melakukan perubahan, jangan melihat organisasi sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang terpisah satu sama lain,

jika perubahan dilakukan dengan organisasi secara keseluruhan sistem maka perubahan yang direncanakan akan berjalan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yaitu Ariwibowo Hadibroto. S.STP. M.MP, selaku Camat kecamatan Belat mengatakan bahwa :

Pembaharuan, perubahan dan penyempurnaan pasti kami lakukan dan sesuai yang di butuhkan serta perkembangan Kampung KB tersebut. Setelah kurang lebih hampir tiga tahun berjalannya Kampung KB yang merupakan program dari Pusat terutama untuk wilayah pesisir seperti kepulauan riau agar bisa meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup masyarakat, tentunya tidak mudah, dan dimulai dari penekanan angka penduduk dengan menggalakkan program KB di tuang Kampung KB agar lebih terfokuskan. Pembaharuan yang terjadi disini yang awalnya Kambung KB hanya satu Desa di Kecamatan Belat, sekarang sudah bertambah di setiap Desa memiliki Kampung KB. Banyak pembaruan yang terjadi dalam struktur Kampung KB kedepannya terutama di Desa Penarah yang akan menjadi contoh bagi Kampung KB lainnya. Perubahan struktur Kepengurusan Kampung KB akan dilakukan dalam beberapa bulan kedepan setelah peresmian setiap Kampung KB di semua Desa di Kecamatan Belat (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Belat Rabu 18 Desember 2019_10 : 45 WIB).

Dari ungkapan diatas menyatakan bahwa pembaruan terhadap Kampung KB Desa Penarah pasti akan dilakukan, namun sesuai dengan perkembangan kedepan nantinya. Dan didukung dengan penyampaian Iskandar mengungkapkan bahwa :

Dalam hal pengorganisasian secara keseluruhan pembaharuan terhadap kepegurusan Kampung KB akan dilakukan sesuai keperluan dan untuk saat ini dalam beberapa bulan akan dilakukan nya pembaharuan terhadap struktur Kampung KB. Pembaharuan dilakukan tentunya dengan akan diadakan kegiatan yang lebih luas terhadap program ini sehingga beberapa kepengurusan ada yang harus diganti dan ada yang harus ditambah. Sebagai PLKB Kecamatan selalu berkoordinasi dengan PLKB Desa untuk menentukan kapasitas pembaharuan Kampung KB priode selanjutnya (Iskandar, Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga berencana Rabu 18 Desember 2019_11:30 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Camat melakukan pembaharuan terhadap Kampung KB sesuai keperluan dan dalam beberapa bulan kedepan akan dilakukannya pembaruan terhadap struktur Kampung KB Desa Penarah. Selanjutnya hasil penelitian dengan Suryani menyampaikan bahwa :

Untuk saat ini pembinaan terhadap perubahan pengorganisasian Kampung KB sendiri baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Camat sendiri sudah berkoordinasi terhadap PLKB Desa untuk mencari data warga yang berkapasitas aktif untuk ikut dalam kepengurusan, dan yang diutamakan dalam Kampung KB ini pemuda dan remaja agar terbentuknya sistem yang terencana dan kegiatan Kampung KB menjadi daya tarik untuk pemuda remaja setempat untuk mendorong meningkatkan ketahanan dan kualitas masyarakat Desa (Suryani, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah, Kamis 19 Desember 2019_10:00 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa pembaruan dari Kampung KB akan dilakukan dari struktur dan fungsinya kedepan. Kemudian, menurut wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kampung KB Desa Penarah Suprianto, beliau mengatakan :

Peran Camat dalam organisasi secara keseluruhan masih minim, hanya kami dapat dalam kegiatan selalu menekankan hasil kerja yang efektif dalam menarik warga untuk konsisten berpartisipasi terhadap Kampung KB. Interaksi yang dilakukan akan dilakukannya pembaharuan SK Pokja Kampung KB bulan Februari kedepan, Kader Poktan Kampung KB sesuai dengan 8 fungsi keluarga, pertemuan kelompok kegiatan UPPKS lebih ditingkatkan untuk februari depan (Suprianto, Ketua Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:00 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat bahwa untuk saat ini Camat ini akan melakukan pembaruan struktur kampung KB dengan menempatkan kader poktan Kampung KB sesuai 8 fungsi keluarga.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan peserta Kampung KB Desa Penarah Zaidah beliau mengatakan :

Untuk pembaruan itu pernah disampaikan dalam kegiatan bahwa akan dilakukannya pembaruan dan penambahan struktur Kampung KB serta akan dilaksanakannya kegiatan 8 fungsi keluarga yang merupakan kegiatan utama Kampung KB (Zaidah, Peserta Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:35).

Ungkapan diatas sama halnya dengan pernyataan dari Ketua Kampung KB bahwa akan dilaksanakan pembaruan struktur Kampung KB penambahan untuk menerapkan 8 fungsi Keluarga nantinya.

Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk pembaruan dan penyempurnaan struktur akan dilaksanakan saat semua kegiatan dari program Kampung KB akan di jalankan. Pembaharuan terkait struktur penambahan seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dan luas wilayah cakupan Kampung KB. Penambahan seksi 8 (delapan) fungsi keluarga yaitu seksi keagamaan, seksi sosialisasi/Pendidikan, seksi reproduksi, seksi ekonomi, seksi perlindungan, seksi kasih sayang, seksi sosial budaya, seksi pembinaan lingkungan. Dalam pembaharuan struktur nantinya akan dilakukannya penetapan penempatan seksi sesuai dengan warga yang cukup berperan aktif dalam kegiatan Kampung KB.

Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan bahwa Camat dalam pembinaan terhadap organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pembaharuan dan penyempurnaan Kampung KB masih belum maksimal. Karena lambannya dalam melakukan pembaruan untuk menerapkan 8 fungsi keluarga di Kampung KB ini yang menjadi tujuan terbentuknya Kampung KB tersebut untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup masyarakat.

Observasi juga menunjukkan bahwa dengan belum adanya paparan struktur Kampung KB baik di Kecamatan maupun Desa merupakan minimnya peran camat dalam pengorganisasian secara keseluruhan.

Tabel V.2 Kepengurusan Kampung KB Desa Penarah

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Aribowo Hadibroto, SSTP.M.MPd	Pembina	Camat Belat
2	Awaluddin	Penasehat	Kepala Desa
3	Suryana	Penanggung Jawab	PLKB Desa
4	Suprianto	Ketua	
5	Zaidah	Sekretaris	
6	Zulhijah	Bendahara	
7	Safri	Anggota	
8	Ngadiman	Anggota	

(Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Penarah Nomor 08 Tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas bahwa struktur organisasi dari Kampung KB Desa Penarah masih belum membentuk struktur organisasi yang lengkap seharusnya Kampung KB.

Sebagaimana fakta diatas Peran Camat masih minim dalam pembinaan organisasi secara keseluruhan, belum melakukan pembaharuan setelah 3 tahun berdirinya Kampung KB, belum menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga yang merupakan hakikat dari Kampung KB sesuai Pedoman Pengelolaan Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017.

c. Dikelola

Dikelola dalam penelitian ini kegiatan untuk semangat melakukan perubahan dan pembinaan organisasi pengelolaan dimulai dari pucuk pimpinan dengan melibatkan bawahan, usaha perubahan dan pembinaan membutuhkan kebijaksanaan, sikap-sikap yang baru (innovative), biaya, dan

komitmen dengan waktu dan tenaga. Kesemuanya itu datang nya dari pucuk pimpinan, selain itu pembinaan organisasi sangat membutuhkan koordinasi bisa ditangani atau dikoordinasikan oleh suatu badan atau unit tertentu atas nama pucuk pimpinan dan badan atau unit ini secara structural tercantum dalam susunan organisasinya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Rabu, 18 Desember 2019 pukul 10.45 di Kantor Kecamatan Belat dengan Ariwibowo Hadibroto. S.STP. M.MP mengatakan bahwa :

Sistem pengelolaan pembinaan ini masih dalam langkah perencanaan akan disusun secara teratur untuk setiap pertemuan dengan pengelola Kampung KB. Dimulai dari pembinaan kepemimpinan, membuka wawasan tentang hal-hal inovatife dalam kegiatan Kampung KB kedepan nantinya. Penentuan kegiatan secara tepat sesuai 8 fungsi keluarga akan segera di terapkan di Kampung KB Desa Penarah. Setiap kegiatan dilakukan diharapkan menjadi sebuah program pembangunan terpadu dan terintergrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Belat Rabu 18 Desember 2019_10 : 45 WIB).

Dari ungkapan diatas Camat menjelaskan bahwa pembinaan dalam system pengelolaan dimulai nantinya dengan pembinaan kepemimpinan yang akan berdampak terhadap kebijakan untuk dapat menumbuhkan sikap-sikap inovatife dalam Kampung KB. Didukung oleh pernyataan Iskandar selaku Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan beliau menyatakan :

Dalam pembinaan pengelolaan tentu dilakukan dari pimpinan hingga anggota Kampung KB. Setiap pelaksanaan kegiatan Camat hadir berkoordinasi kesetiap pengurus Kampung KB mengenai perkembangan maupun masalah yang dihadapi, selalu menekankan untuk tetap mencari inovasi baru untuk kemajuan Kampung KB

tersebut. Ini merupakan salah satu pembinaan dalam pengelolaan yang dilakukan Kecamatan saling berkoordinasi di setiap agenda kegiatan Kampung KB (Iskandar, Pelaksanaan fungsi petugas lapangan keluarga berencana, Rabu 18 Desember 2019_11:30 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa pembinaan dalam pengelolaan sejalan dengan jalannya kegiatan dilakukan koordinasi untuk tetap mencari inovasi baru kemajuan Kampung KB. Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Suryani beliau mengungkapkan :

Peran Camat dalam pembinaan pengelolaan Kampung KB masih minim karena hanya dilakukan koordinasi pada setiap agenda kegiatan. Sehingga masih banyak pengurus Kampung KB yang belum bisa memaksimalkan kinerja Kampung KB, masih belum munculnya inovasi terbaru dari Kampung KB untuk melihat potensi di Desa. Sehingga Kampung KB hanya menjalankan setiap kegiatan dari arahan BKKBN Kabupaten, masih belum mampu keluar untuk menentukan jalannya kampung KB sesuai 8 fungsi keluarga (Suryani, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah, Kamis 19 Desember 2019_10:00 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan Camat masih minim karena hanya dengan melakukan koordinasi pada saat ada kegiatan belum menimbulkan inovasi baru. Kemudian, menurut wawancara yang dilakukan dengan Suprianto beliau mengatakan :

Dalam pengelolaan mungkin Camat sangat berperan dalam menunjukkan setiap langkah yang harus kami ambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Juga menekankan agar selalu meningkatkan atau melakukan suatu sikap innovative membuat pembaharuan terhadap kegiatan agar tifak terkesan kaku, ini dilakukan dengan koordinasi dari Kecamatan, Desa, dan Kampung KB sendiri (Suprianto, Ketua Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:00).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Camat sudah berperan menunjukkan setiap kebijakan yang harus diambil dalam kegiatan dengan

Camat selalu hadir setiap agenda Kampung KB. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Zaidah beliau mengatakan :

Saya menilai bahwa Camat memang ikutserta dalam pengelolaan Kampung KB, saya selaku peserta sangat sering diajak untuk aktif berkomunikasi kepada pengelola Kampung KB agar dapat membantu menciptakan suatu hal yang baru dalam Kampung KB (Zaidah, Peserta Kampung KB, Jum'at 20 Desember 2019_14:35).

Ungkapan diatas bahwa Camat ikut serta dalam pengelolaan Kampung KB dengan seringnya berkomunikasi untuk selalu diingatkan agar aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembinaan dalam pengelolaan Kampung KB masih belum optimal dalam pembinaan terhadap kepemimpinan baru sebatas perencanaan dan belum dilakukan. Belum adanya sikap-sikap innovative dari pengelolaan Kampung KB setelah 3 setengah tahun berjalannya program Kampung KB dibentuk, kegiatan Kampung KB masih terfokus pada kegiatan BKKBN Kabupaten ini juga dikarenakan belum terstrukturnya Kampung KB secara sepenuhnya. Masih belum adanya sumber dana Kampung KB juga merupakan bentuk belum berjalannya pembinaan pengelolaan Kampung KB ini, seharusnya Kampung KB bisa mendapatkan beberapa sumber dana dari iuran waega Kampung KB, APBDesa/Kelurahan, APBD II, APBN, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Kemitraan /CSR perusahaan, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pembinaan dalam pengelolaan terhadap Kampung KB sudah baik dengan berjalannya koordinasi antara Camat dengan peserta Kampung KB membuat jalannya kegiatan agar selalu meningkatkan inovasi baru terhadap perubahan Kampung KB. Namun dengan kegiatan yang hanya masih dalam ruang lingkup penekanan pertumbuhan jumlah penduduk dengan kegiatan KB, masih belum terlihat inovasi yang dilakukan oleh Kampung KB.

Sedangkan menurut pedoman pengelolaan Kampung KB dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017 bahwa hakikat Kampung KB adalah tidak hanya membumikan dan menggelorakan program KB, namun masih banyak progress hakikat dari Kampung KB yang belum dijalan kan di Kampung KB Desa Penarah. Dengan belum berjalan secara maksimal dalam hal serahsehan tingkat RT dan serahsehan tingkat Kampung mengakibatkan Kampung KB ini tidak dapat dibawa dalam Musrendabngdes agar masuk dalam RPJMDes, RKPDesa dan APBDes.

d. Efektivitas dan Kesehatan Organisasi

Efektivitas dan kesehatan organisasi adalah usaha untuk mencapai efektivitas dan kesehatan organisasi ditujukan untuk memajukan harkat kemampuan dan proses sosial dalam organisasi. Pembinaan organisasi berorientasi pada hasil dan penyesuaian dengan kemampuan organisasi untuk mencapai hasil-hasil tersebut. Hal ini berarti bahwa organisasi ingin mencapai efektifitas, dan sekaligus usaha-usaha dilakukan secara sehat. Dengan demikian diharapkan agar organisasi mampu menyesuaikan kesuatu keadaan

yang lebih baik, mampu mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri, dan mampu memperbaharui dirinya sendiri. Berikut wawancara

dengan Ariwibowo Hadibroto. S.STP. M.MP mengatakan bahwa :

Untuk mencapai berjalannya program Kampung KB sesuai tujuan pembinaan dilakukan dengan menetapkan prinsip penyesuaian pada potensi dan kemampuan setiap pengurus kampung KB. Dengan tetap melibatkan beberapa PLKB Desa penarah diawal masa terbentuknya Kampung KB ini. Dalam kegiatan kami selalu memberikan perhatian untuk tetap mampu menyesuaikan keadaan agar lebih baik agar mencapai tujuan Kampung KB (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Kecamatan Belat, Rabu 18 Desember 2019_10:00).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa untuk tercapainya efektifitas dan kesehatan organisasi Camat melibatkan PLKB Desa dalam pembentukan Kampung KB tersebut. Sama halnya dengan pernyataan diatas menurut

Iskandar beliau mengungkapkan :

Pembinaan yang dilakukan Camat dalam menjaga efektivitas Kampung KB tentu dilakukan dengan berbagai macam cara baik dalam pemberian dorongan meningkatkan kinerja dan menempatkan PLKB desa sebagai awal terbentuknya Kampung KB agar mampu membuat dampak baik untuk kepengurusan Kampung KB (Iskandar, Pelaksanaan fungsi petugas lapangan keluarga berencana Kecamatan, Rabu 18 Desember 2019_11:30).

Ungkapan diatas mendukung pernyataan Camat bahwa awal pembentukan Kampung KB ini dimulai dengan menempatkan PLKB Desa dalam struktur Kampung KB. Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Suryani beliau mengungkapkan :

Dalam hal ini Camat sudah sangat berperan dengan melibatkan beberapa perangkat Desa untuk masuk dalam Kepengurusan Kampung Kb, dan awal pembentukan sangat berkoordinasi dalam hal pembentukan struktur agar yang menjadi pengelola orang yang bisa dan memiliki kemampuan dan potensi menjalankan program tersebut (Suryani, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah, Kamis 19 Desember 2019_10:00 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa melibatkan PLKB Desa dan perangkat Desa merupakan langkah yang tepat dalam awal pembentukan Kampung KB. Kemudian, menurut wawancara yang dilakukan dengan Suprianto beliau mengatakan :

Camat sangat menekankan untuk kami agar tetap solid berkerjasama dalam setiap hal mengenai Kampung KB. Beliau selalu mengingatkan bahwasanya program ini merupakan awal untuk memperbaiki masyarakat agar memiliki kualitas yang baik dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Untuk meningkatkan setiap kebijakan harus melibatkan seluruh pengelola dan atau mungkin peserta Kampung KB (Suprianto, Ketua Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:00 WIB).

Dari ungkapan diatas menyatakan bahwa Camat sangat berperan dalam saling berkerja sama untuk setiap kegiatan agar menjadi awal memperbaiki kualitas keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Zaidah beliau mengatakan :

Menurut saya selaku peserta Kampung KB program ini sedikit banyak sudah sangat membantu kami, terutama bagi kami sebagai perempuan merasakan beberapa kegiatan Kampung KB dalam meningkatkan kualitas hidup, juga mendapatkan pelayanan KB yang jauh lebih baik sekarang ini (Zaidah Peserta Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:35 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa dengan adanya Kampung KB sudah sangat membantu terutama sebagai perempuan lebih teraturnya mendapatkan pelayanan KB saat ini.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk tercapainya efektifitas dan kesehatan organisasi Camat melibatkan PLKB Desa dalam pembentukan Kampung KB tersebut. Menempatkan PLKB Desa dalam struktur Kampung KB. Namun Kampung

KB masih belum memajukan harkat kemampuan dan proses sosial dalam organisasi. Kampung KB sendiri masih belum mampu menyesuaikan kesuatu keadaan yang lebih baik, belum mampu mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalannya untuk menemukan inovasi baru dalam kegiatan Kampung KB yang meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan masyarakat. Dalam hal efektivitas kerja Kampung KB masih kurangnya pelaporan juga menunjukkan belum optimalnya peran Camat dalam pembinaan ini.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan efektivitas dan kesehatan organisasi dalam Kampung KB masih belum optimal masih minimnya peran Kampung KB dalam berbagai kegiatan dan belum keseluruhan dari masyarakat yang ikut berpartisipasi pada Kampung KB. Kegiatan yang dilakukan untuk saat ini hanya pada basis menggalakkan program KB sementara dalam pembinaan remaja dan lansia kurang berjalan baik.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan uraian tugas kecamatan tipe A dan kelurahan pada Pasal 3 Ayat 2 huruf c yaitu melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan social dan lingkungan hidup, akan tetapi peran camat dalam pembinaan untuk efektivitas dan kesehatan organisasi masih lemah dalam memberikan penekanan untuk peningkatan potensi dari program Kampung KB.

e. Intervensi yang Berencana

Intervensi yang berencana adalah usaha untuk melakukan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Intervensi ini harus direncanakan secara seksama, agar dicapai efektivitas dan efisiensi

perubahan. Bentuk-bentuk intervensi pembinaan organisasi dapat berupa pendidikan, pelatihan, metode reflektif, pengamatan diri, dan belajar mengerjakan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan

dengan Ariwibowo Hadibroto. S.STP. M.MP mengatakan bahwa :

Intervensi yang dilakukan agar mencapai efektivitas dan efisiensi perubahan tentunya dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan, BKKBN Kabupaten bermitra bersama Kecamatan untuk melakukan pelatihan ke setiap Pokja di Kampung KB. Memberikan gambaran langkah yang akan dijalankan oleh program Kampung KB dalam mencapai tujuan, diberikan buku panduan kepada pengelola Kampung KB juga merupakan salah satu intervensi pembinaan (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Kecamatan Belat, Rabu 18 Desember 2019_10:30 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa sudah diadakan pelatihan untuk kesetiap pokja di kampung KB. Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Iskandar beliau mengungkapkan :

Intervensi pasti dilakukan Camat berkoordinasi bersama BKKBN untuk mengadakan Pelatihan dan sosialisasi terkait Kampung KB. Memberikan kesempatan kepada pengurus Kampung KB untuk mempertajam pengetahuan tentang tujuan dan sasaran Kampung KB. Melakukan intervensi melalui kerja sama dengan BKKBN Kabupaten karena, untuk melaksanakan pelatihan dan sosialisasi dari kecamatan masih terhalang belum adanya anggaran untuk kampung KB (Iskandar, Pelaksanaan fungsi tugas lapangan Keluarga Berencana, Rabu 18 Desember 2019_11:35).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa sudah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan terkait Kampung KB Bersama BKKBN Kabupaten Karimun. Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan menurut Suryani yang beliau mengungkapkan :

Sosialisasi dan pelatihan pernah dilakukan oleh Camat dan BKKBN Kabupaten Karimun, tentang pengenalan Kampung KB tujuan dan sasarannya. Namun sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan hanya awal sebelum pencanangan Kampung KB, setelah itu belum ada lagi di adakan pelatihan atau pendidikan untuk kepengurusan Kampung KB

(Suryani, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah, Kamis 19 Desember 2019_10:30 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan hanya dilakukan pada awal pencanangan Kampung KB saja. Kemudian, menurut wawancara yang dilakukan dengan Suprianto beliau mengatakan :

Selama ini pelatihan yang dilakukan untuk fokus pada Kampung KB belum ada. Pelatihan yang pernah dilakukan masih dalam ruang lingkup program KB saja. Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran baru itu yang pernah saya dapatkan (Suprianto, Ketua Kampung KB Desa Penarah Jum'at 20 Desember 2019_14:00 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa pernah diadakan pelatihan tentang pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran yang pernah beliau ikuti. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan peserta Kampung KB Desa Penarah Zaidah, beliau mengatakan :

Menurut saya pelatihan yang didapatkan untuk Kampung KB disini hanya sekali diluar pengadaan kegiatan seperti biasanya. Dilakukan oleh Kecamatan dan pihak BKKBN Kabupaten karimun (Zaidah, Peserta Kampung KB Desa Penarah Jum'at 20 Desember 2019_14:35 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menyatakan bahwa pernah dilakukan pelatihan dari kecamatan dan BKKBN Kabupaten Karimun selama berdirinya Kampung KB.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Camat belum optimal dalam melakukan intervensi yang berencana yaitu pelatihan dan Pendidikan untuk Kampung KB Desa Penarah, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang dipunyai oleh Kecamatan. Camat dalam mengadakan pelatihan masih bermitra Bersama BKKBN

Kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kesetiap pokja Kampung KB, dan pembinaan ini hanya dilakukan pada saat penancangan Kampung KB saja.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pelatihan belum optimal pelatihan yang dilakukan hanya sekali dan tentang pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran. Untuk pembinaan pelatihan terhadap pokja Kampung KB belum diadakan selama ini, hanya sosialisasi tahap awal penancangan Kampung KB Desa Penarah yang dilakukan oleh Kecamatan dan pihak BKKBN Kabupaten Karimun.

Sebagaimana fakta diatas peran Camat dalam pembinaan Kampung KB belum optimal sesuai dengan data yang didapat dari statistik Kampung KB tentang intervensi sosialisasi dan pelatihan yang pernah dilakukan belum pernah melakukan pelatihan pokja dan poktan Kampung KB.

No	Dusun di Penarah	Pelatihan/Sosialisasi bagi Pokja Kampung KB		Jumlah
		Ada	Tidak	
1	03	0	1	1
	Jumlah	0	1	1

(Sumber : Statistik Kampung KB 2019)

Dari tabel diatas membuktikan bahwa belum di adakannya pelatihan/sosialisasi untuk Pokja Kampung KB Desa Penarah dari Kecamatan dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Karimun unttuk saat ini.

f. Pengetahuan Ilmu Perilaku

Pengetahuan ilmu perilaku merupakan usaha-usaha menambah pemahaman pada individu dan kelompok. Usaha-usaha ini untuk menambahkan pemahaman pada individu dan kelompok, melalui pendekatan pada ilmu perilaku organisasi untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam suatu kelompok. Kegiatan pengembangan dan pembinaan organisasi tidak saja menangani masalah pekerjaan manusia didalam suatu kelompok secara fisik, melainkan meliputi perasaan, sikap, tingkah laku, kebutuhan dan motivasinya dalam berkerja didalam kelompok tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ariwibowo Hadibroto. S.STP.

M.MP mengatakan bahwa :

Pendekatan pasti dilakukan dalam setiap agenda kegiatan melihat setiap perkembangan yang terjadi, dilakukannya pemberian masukan agar Kampung KB bisa lebih baik dalam bekerja sama sesama kepengurusan dengan peserta dan pihak BKKBN agar lebih mampu berinteraksi berani memberikan inovasi kegiatan baru meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup masyarakat Desa Penarah (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Kecamatan Belat Rabu 18 Desember 2019_10:00 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa telah dilakukan pendekatan kepada Kampung KB baik dengan kepengurusan dan peserta Kampung KB untuk melihat perkembangan Kampung KB dan pribadi masyarakat. Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Iskandar beliau mengungkapkan :

Pendekatan dilakukan dalam hal memberikan pemahaman bahwa pentingnya kerjasama dalam setiap kegiatan yang dilakukan menekankan sikap agar setiap kegiatan yang dilaksanakan harus bisa berjalan dengan baik. Memberikan pemahaman untuk bisa berperilaku baik dalam agenda Kampung KB agar menarik simpati dari semua peserta Kampung KB (Iskandar, Pelaksanaan fungsi tugas lapangan keluarga berencana Kecamatan Belat, Rabu 18 Desember 2019_11:30 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa pendekatan dilakukan dengan memberikan pemahaman dan masukan kepada kepengurusan Kampung KB untuk tetap solid bekerjasama. Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Suryani beliau mengungkapkan :

Pemberian motivasi pasti dilakukan dalam setiap kegiatan Kampung KB, baik pada awal pembukaan biasanya Camat melakukan sabutan terhadap pengelola dan peserta Kampung KB, maupun diluar agenda kegiatan masih sering dilakukan pemberian masukan dorongan agar bisa lebih berkerja secara baik dalam segala hal(Suryani, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Penarah, Kamis 19 Desember 2019_10:30 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan Camat sudah sangat baik dengan seringnya memberikan masukan dorongan agar bisa menjadi Kampung KB yang mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kemudian, menurut wawancara dengan Suprianto, beliau mengatakan :

Saya sebagai Ketua Kampung KB tentunya sangat sering berkomunikasi dengan Camat, dan beliau pun sering memberikan arahan dan motivasi kepada kami. Tentang bagaimana seharusnya memanfaatkan program ini sebaik mungkin agar dapat membantu kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat setempat. Camat sendiri orang nya cukup ramah kepada masyarakat disini jadi menurut saya tidak ada masalah dalam pembangunan hubungan kami masyarakat dan Camat (Suprianto, Ketua Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:00 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa peran Camat terhadap pendekatan kepada kepengurusan dan peserta Kampung KB cukup baik. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan peserta Kampung KB Desa Penarah Zaidah beliau mengatakan :

Menurut saya selaku masyarakat dalam program Kampung KB, kami sering diberikan arahan dari Camat untuk tetap aktif ikut serta dalam program ini. Dalam hal berkomunikasi pun saya rasa Camat tidak pilih-pilih, orangnya ramah terhadap masyarakat (Zaidah, Peserta Kampung KB Desa Penarah, Jum'at 20 Desember 2019_14:35 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menyatakan bahwa Camat sudah sangat dekat dengan peserta Kampung KB dengan seringnya berkomunikasi secara rutin setiap agenda Kegiatan Kampung KB.

Dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembinaan dalam pengetahuan ilmu perilaku yang dilakukan oleh Camat sudah sangat baik, dengan komunikasi yang baik dilakukan terhadap setiap pengurus dan masyarakat di Kampung KB. Melihat perkembangan Kampung KB dan Masyarakat secara bersamaan, memberikan pemahaman dan masukan kepada kepengurusan Kampung KB solid dalam bekerjasama membangun Kampung KB yang mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa untuk pendekatan yang Camat lakukan sangat baik kepada setiap peserta Kampung KB, dengan terjalinnya komunikasi yang baik membuat kedekatan kepada kepengurusan sering memberikan masukan motivasi agar tetap semangat bekerjasama mengembangkan Kampung KB agar lebih baik kedepannya.

Sebagaimana fakta diatas Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB untuk segi pendekatan sudah baik dengan hasil wawancara yang menyatakan kepuasan terhadap komunikasi yang dijalin Bersama Camat di setiap kegiatan Kampung KB.

C. Hambatan-hambatan Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh informasi tentang Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum optimal dengan baik disebabkan beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Kecamatan Belat yang menyatakan :

Peran yang dilakukan Camat selaku Pembina Kampung KB memang belum menyeluruh direncanakan secara tertata, dikarenakan Anggaran untuk perencanaan pembinaan kepada setiap Kampung KB belum di anggarkan, dan selama ini hanya dilakukan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Karimun untuk perencanaan setiap kegiatan Kampung KB. Dan peran Camat selaku pembina disini hanya bisa memfasilitasi dalam peresmian dan mengikuti setiap kegiatan Kampung KB bersama PLKB Kecamatan Belat (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Belat Rabu 18 Desember 2019_10 : 45 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa Camat telah melakukan perencanaan pembinaan terhadap Kampung KB namun belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena masih minimnya anggaran untuk pembinaan Kampung KB saat ini. Hal ini menjadi factor penghambat Camat dalam melaksanakan pembinaan terhadap Kampung KB Desa Penarah.

Pembaharuan, perubahan dan penyempurnaan pasti kami lakukan dan sesuai yang di butuhkan serta perkembangan Kampung KB tersebut. Setelah kurang lebih hampir tiga tahun berjalannya Kampung KB yang merupakan program dari Pusat terutama untuk wilayah pesisir seperti kepulauan riau agar bisa meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup masyarakat, tentunya tidak mudah, dan dimulai dari penekanan angka penduduk dengan menggalakkan program KB di tuang Kampung KB agar lebih terfokuskan. Pembaharuan yang terjadi disini yang awalnya Kambung KB hanya satu Desa di Kecamatan Belat, sekarang sudah bertambah di setiap Desa memiliki Kampung KB. Banyak pembaruan yang terjadi dalam struktur Kampung KB kedepannya terutama di Desa Penarah yang akan menjadi contoh bagi Kampung KB lainnya.

Perubahan struktur Kepengurusan Kampung KB akan dilakukan dalam beberapa bulan kedepan setelah peresmian setiap Kampung KB di semua Desa di Kecamatan Belat (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Belat Rabu 18 Desember 2019_10 : 45 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Camat akan melakukan pembaharuan dan penyempurnaan terkait kepengurusan kampung KB setelah diadakannya proses penerapan 8 fungsi keluarga dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Karena dengan belum dijalankannya semua kegiatan Kampung KB seperti penerapan 8 fungsi keluarga, hal ini menjadi factor penghambat dalam Camat melakukan pengembangan terhadap dampak keberadaan Kampung KB di Desa Penarah.

Sistem pengelolaan pembinaan ini masih dalam langkah perencanaan akan disusun secara teratur untuk setiap pertemuan dengan pengelola Kampung KB. Dimulai dari pembinaan kepemimpinan, membuka wawasan tentang hal-hal inovatife dalam kegiatan Kampung KB kedepan nantinya. Penentuan kegiatan secara tepat sesuai 8 fungsi keluarga akan segera di terapkan di Kampung KB Desa Penarah. Setiap kegiatan dilakukan diharapkan menjadi sebuah program pembangunan terpadu dan terintergrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya (Ariwibowo Hadibroto S.STP.M.MP, Camat Belat Rabu 18 Desember 2019_10 : 45 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelolaan terhadap Kampung KB masih dalam tahap perencanaan dengan dimulai dengan pembinaan kepemimpinan dan membuka wawasan tentang hal-hal inovatife dalam kegiatan Kampung KB untuk meningkatkan ekonomi dan Pendidikan masyarakat Desa Penarah. Hal ini menjadi factor penghambat karena tingkat Pendidikan masyarakat yang minim rendah membuat inovasi baru sulit untuk diterapkan di Kampung KB.

Berdasarkan observasi peneliti, maka peneliti berpendapat Camat tidak dapat melaksanakan pembinaan secara optimal disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran dana yang dimiliki oleh Kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap Kampung KB.
2. Kurangnya koordinasi antara Camat dengan BKKBN Kabupaten dalam meningkatkan pembinaan Kampung KB agar lebih terencana.
3. Belum berjalannya program Kampung KB secara keseluruhan menjadi hambatan Camat untuk melaksanakan pembinaan lebih lanjut.
4. Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk menyampaikan aspirasi, ide dan gagasan kepada Camat untuk peningkatan efektifitas kinerja program Kampung KB.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakkan Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB diDesa Penarah Kecamatan Belat Kabpaten Karimun sebagai berikut :

Secara keseluruhan pelaksanaan Peran Camat dalam Pembinaan Kampung KB diDesa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum berjalan baik, hal ini bisa dilihat dari masih belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Camat yaitu (1) Dalam hal pembinaan yang berencana dan berjangka panjang dari Camat terhadap Kampung KB masih belum berjalan maksimal, dengan kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembinaan yang berjangka panjang ini berupa anggaran dana untuk melaksanakan pembinaan Kampung KB yang belum ada, dari penjelasan wawancara dan data statistik Kampung KB, dari Dana Desa, Swadaya, Donasi/Hibah Masyarakat, APBD, APBN, dan Perusahaan (CSR). Pembinaan yang dilakukan Camat hanya menyesuaikan pada setiap kegiatan Kampung KB Bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Karimun. (2) Dalam pelaksanaan organisasi secara keseluruhan dari Camat dilakukan sesuai keadaan Kampung KB dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembaharuan akan dilaksanakan pada saat Kampung KB melaksanakan kegiatan 8 fungsi keluarga dalam masyarakat dengan pembaruan penambahan bagian struktur Kampung KB agar lebih terorganisir. Pembaruan Kampung KB ini pertama kali akan dilakukan setelah 3 tahun

berdirinya Kampung KB di Desa Penarah. (3) Dalam sistem pengelolaan perubahan yang efektif dari Camat masih belum berjalan maksimal, dengan belum adanya suatu usaha perubahan yang innovative terhadap Kampung KB hanya sebatas pada program dan kegiatan rutin program KB. Masih belum mampu dalam mencari sumber dana tersendiri untuk Kampung KB sehingga banyak kegiatan yang seharusnya dilaksanakan Kampung KB terhambat oleh minimnya dana Kampung KB. (4) Efektivitas dan kesehatan organisasi dalam hal ini Kampung KB di Desa Penarah masih belum mampu menyesuaikan kesuatu keadaan yang lebih baik, belum mampu mengatasi dan memecahkan persoalan yang terjadi di Kampung KB seperti meningkatkan partisipasi masyarakat yang seharusnya semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam program ini. Dalam hal ini Camat dinilai masih minim melakukan tindakan untuk perubahan efektif terhadap Kampung KB. (5) Memberikan intervensi dalam hal ini Camat masih minim melaksanakan pelatihan terhadap Kampung KB, dilaksanakan pelatihan/sosialisasi saat pencaangan Kampung KB dan peresmian memberikan sosialisasi pengenalan terhadap Kampung KB. (6) Dalam hal pengetahuan ilmu perilaku dari Camat sudah cukup baik dengan mudah berinteraksi terhadap masyarakat dalam kegiatan Kampung KB memberikan masukan motivasi dalam partisipasi terhadap Kampung KB. Salah satu penghambat partisipasi masyarakat dalam program ini yaitu ekonomi yang masih minim dilingkungan Kampung KB, sehingga tidak punya waktu untuk mengikuti dan terlibat langsung secara baik terhadap program ini.

B. Saran

Dalam hasil kesimpulan yang telah diturunkan diatas tentang Peran Camat Dalam Pembinaan Kampung KB diDesa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Camat segera mungkin membuat menjalankan program 8 (delapan) fungsi keluarga dalam aplikasi kehidupan.
2. Meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB PPPA dengan pelaksanaan kegiatan memberikan pembinaan kepada Kampung KB.
3. Camat Meningkatkan kemampuan dalam pemahaman, penyampaian dan pelaksanaan materi melalui pelatihan-pelatihan tertentu dengan PLKB dan Kader Kampung KB serta tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Bugin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya. AUP.
- David Berry. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dan Sosiologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka
- Giroth, Lexie, M. 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Indrapura
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamutu, Mustamin, Daeng dkk. 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mangunhardjana. 2004. *Pembinaan Arti dan Metodenya Kanisius*. Jogjakarta.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Ranika Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kibernetologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kibernetologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Nordholt, Nico Schutle. 1987. *Kepemimpinan local dan pembangunan perdesaan*. Sinar Harapan. Jakarta.

- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT. Balai Pustaka.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan Yarsif Watampone*. Jakarta.
- Santoso. 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta. Gramedia Pustaka
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Soekanto. Soerjono 2002. *Struktur dan Proses Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. Budi. 2009. *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang: Media Brilliant.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Refika Cipta
- Syaukani. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 1897. *Pembinaan Organisasi*. (Press Diagnosa dan Intervensi). PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 1986. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Thoha, Miftah. 2005. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Aimin Tunggal. 2001. *Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard*. Jakarta. Harvarindo.
- Winkel. WS. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta. Media Abadi.
- Zulkifli. Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa FISIPOL, UIR, Pekanbaru*.

Jurnal

Arizqi Istiadi dan Hj. Weni Rosdiana. 2012. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana. Jurnal Mahasiswa Unesa. Vol 1 No 1. 0-216.

Linda Ratna Sari, Agus Raikhani, Novy Setya Yunas, Iswari Hariastuti. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kampung KB Di Kabupaten Jombang. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen. Vol 2 No 2. 2018

Mardiyono. 2017. Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga Di Jawa Timur. Jurnal Cakrawala. Vol 11 No 2 Desember 2017 : 129-136.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan.

Pedoman Pelaksanaan Kampung KB 2017.